

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**LAPORAN KINERJA (LKj)
Tahun 2019**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662
LUMAJANG – 67313

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunan LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu tahun anggaran 2019. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKj Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program /kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Pada LKj ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan - hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2019.

Lumajang, Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 196600709 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunan LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu tahun anggaran 2019. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKj Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program /kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Pada LKj ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan - hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2019.

Lumajang, Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 196600709 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv - vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Bagan Struktur Organisasi	3
1.3 Kepegawaian	4
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi.....	5
1.6 Sistematika.....	6
BAB II PERJANJIAN KERJA	7
2.1 Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019	7
2.2 Rencana dan Target Kinerja Yang Ditetapkan	8
2.3 Perjanjian Kinerja	9
2.4 Ringkasan APBD Tahun 2019	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Analisis Capaian Kinerja	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	14
BAB IV PENUTUP	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran Program / kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, program/ kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang diformulasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Program Kerja setiap tahun anggaran.

Dengan Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan alokasi dana yang ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 8 program dan 30 kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran. Hal ini Dapat dilihat pada Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meliputi 1 Kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Ini sebesar Rp. 3.517.140.850,-
Realisasi Rp. 3.408.942.859,78

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 2 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 3.070.953.400,-
Realisasi Rp. 3.041.446.835,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan meliputi 7 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 46.980.000,-
Realisasi Rp. 41.737.500,-

4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah meliputi 5 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 2.185.039.500,-
Realisasi Rp. 2.028.974.827,-

5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi 6 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 803.741.650,-
Realisasi Rp. 646.146.600,-

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi 5 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 1.552.776.600,-
Realisasi Rp. 1.157.003.979,-

7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi 3 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 1.181.079.900,-
Realisasi Rp. 830.266.200,-

8. Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 1 kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 897.488.100,-
Realisasi Rp. 809.339.450,-

----- ooOoo -----

BAB. I

PENDAHULUAN

1. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI OPD.

1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah;
- d. pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

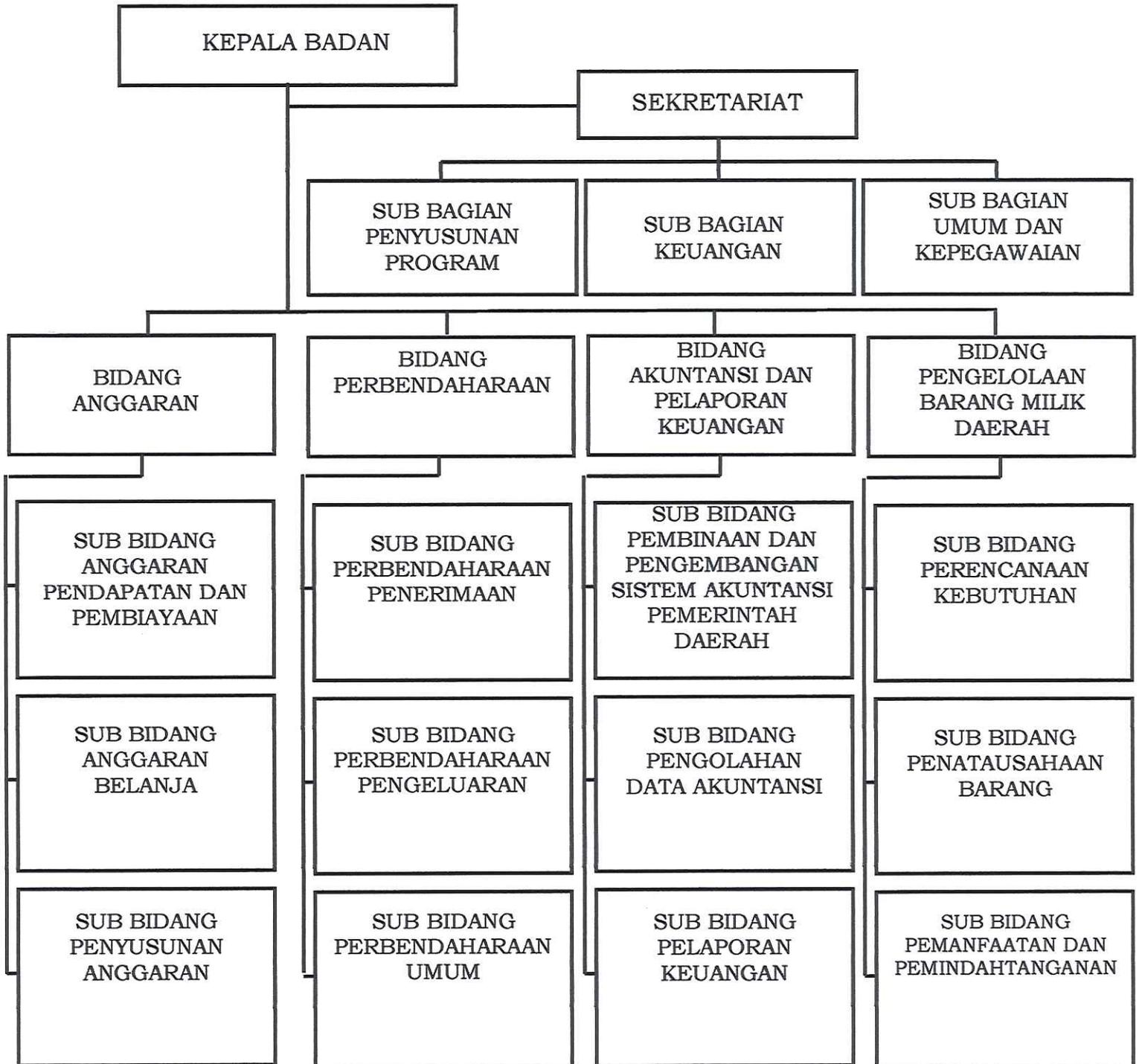
- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
- c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Umum;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 3. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**1.2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



1.3 Kepegawaian

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian
 - a. Jabatan Struktural : 18 Orang
 - b. Staf PNS : 15 Orang
 - c. Honorer : 30 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
 - a. Magister (S 2) : 2 Orang
 - b. Sarjana (S1) : 12 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma III : 5 Orang
 - d. Sarjana Muda /Diploma II : - Orang
 - e. Sarjana Muda / Diploma I : - Orang
 - f. SLTA : 13 Orang
 - g. SLTP : 1 Orang
 - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
 - a. Sarjana (S1) : 13 Orang
 - b. Sarjana Muda / Diploma III : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma II : 1 Orang
 - d. Sarjana Muda / Diploma I : 2 Orang
 - e. SLTA : 11 Orang
 - f. SLTP : 2 Orang
 - g. SD : - Orang
4. Pangkat dan Golongan
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : - Orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang
 - c. Pembina (IV/a) : 1 Orang
 - d. Penata Tingkat I/ (III/d) : 19 Orang
 - e. Penata (III/c) : 6 Orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 1 Orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 4 Orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 6 Orang
 - i. Pengatur (II/c) : 4 Orang
 - j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 0 Orang
 - k. Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang
 - l. Juru Tingkat I (I/d) : - Orang
 - m. Juru (I/c) : - Orang

- n. Juru muda Tingkat I (I/b) : - Orang
- o. Juru muda (I/a) : - Orang
- 5. Tenaga Honorer : 30 orang

1.4 Dasar Hukum

Adapun Landasan Operasional maupun secara tersirat menguatkan alasan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 24 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kabupaten Lumajang.

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Sedang Dihadapi.

1. Identifikasi Permasalahan

Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BPKD di masa datang, yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan BPKD, mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.

1.6 SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas dan Fungsi
- 1.2 Struktur Organisasi SKPD
- 1.3 Kepegawaian
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi
- 1.6 Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019
 1. Tujuan
 2. Sasaran
 3. Strategi
 4. Kebijakan
- 2.2 Rencana Dan Target Kinerja Yang Ditetapkan
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Ringkasan APBD Tahun 2019
- 2.5 Ringkasan/ Ikhtisar Administrasi perkantoran

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Analisis Capaian Kinerja

BAB. IV PENUTUP

BAB. II

PERJANJIAN KERJA

2.1 RINGKASAN/ IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk untuk mengantisipasi persoalan dan perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

2. Sasaran

Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja . Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu **Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI.**

3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan **internal** yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan

meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

2.2. RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organisation progress.

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

A. Program, kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Apartur;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Apartur.

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
5. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Penyusunan Rencana Kerja
7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja;
2. Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

3. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 4. Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah;
 5. Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
- 5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.**
1. Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA-SKPD;
 2. Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D;
 3. Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD
 4. Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah;
 5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 6. Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.**
1. Proses Pengolahan Data Akuntansi;
 2. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 4. Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. Penyempurnaan, Pengembangan, dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- 7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.**
1. Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah;
 2. Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 3. Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 8. PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Untuk tahun 2019, Perjanjian Kinerja disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah Renstra Th. 2018 - 2023 yang diselaraskan dengan Permendagri No.13 Tahun 2006.

Adapun Kegiatan Setelah Perubahan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

- Anggaran : 3.517.140.850

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

- Anggaran : 2.776.669.900

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

- Anggaran : 294.283.500

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

- Anggaran : 4.250.000

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

- Anggaran : 3.425.000

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Anggaran : 4.250.000

4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

- Anggaran : 4.000.000

5. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

- Anggaran : 2.500.000

6. Penyusunan Rencana Kerja

- Anggaran : 4.250.000

7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

- Anggaran : 24.305.000

4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah.

1. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja

- Anggaran : 99.740.000

2. Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

- Anggaran : 742.072.500

3. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

- Anggaran : 542.231.000

4. Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah

- Anggaran : 748.556.000

5. Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

- Anggaran : 52.440.000

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA-SKPD

- Anggaran : 125.127.000

2. Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D

- Anggaran : 230.734.000

3. Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD
 - Anggaran : 69.646.000
4. Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah
 - Anggaran : 108.226.250
5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
 - Anggaran : 36.400.000
6. Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Anggaran : 233.608.400

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. Proses Pengolahan Data Akuntansi
 - Anggaran : 111.414.000
2. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Anggaran : 386.384.600
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Anggaran : 386.809.000
4. Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Anggaran : 83.771.000
5. Penyempurnaan, Pengembangan, dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - Anggaran : 584.398.000

7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

1. Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah
 - Anggaran : 195.399.900
2. Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Anggaran : 724.217.000
3. Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - Anggaran : 261.463.000

8. Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Anggaran : 897.488.100

2.4 RINGKASAN APBD TAHUN 2019

Dukungan penyediaan dana atau anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan agar dapat menangani seluruh urusan pemerintahan/kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dengan ringkasan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Ringkasan APBD Tahun 2019

Uraian		Anggaran
A	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Asli Daerah	316.538.321.171,60
2	Dana Perimbangan	1.465.258.069.503,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	470.290.631.663,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.252.087.022.337,60
B	BELANJA	
	Belanja Tidak Langsung	1.382.304.843.502,87
	Belanja Langsung	998.306.856.417,06
	Jumlah Belanja Daerah	2.380.611.699.919,93
	Surplus (Defisit)	(128.524.677.582,33)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, diperoleh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD adalah 2 bulan, yakni awal bulan Agustus s/d awal bulan Oktober = 62 hari • Nilai > 100 % = melebihi waktu normal, penyusunan Raperda APBD tidak tepat waktu • Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD tepat waktu 	Perda APBD	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD 2 bulan yakni awal minggu ke-2 Agustus s.d minggu ke-2 bulan September • Nilai > 100 % = melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD tidak tepat waktu • Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda perubahan APBD tepat waktu 	Perda Perubahan APBD	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

<p>3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI</p>	<p>Jumlah waktu riil penyampaian LKPD $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$ Jumlah waktu normal penyampaian LKPD</p> <p>Penjelasan: a. Jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari b. Apabila : <ul style="list-style-type: none"> • Nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. • Nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tepat waktu. </p>	<p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>
<p>4. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD</p>	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$ Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. • Nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu. 	<p>Perda Pertanggungjawaban APBD</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, jumlah alokasi anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 40.267.831.375,87 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.012.631.375,87 dan Belanja Langsung (program/kegiatan) sebesar Rp. 13.255.200.000,00,- Dari total anggaran tersebut diserap sebesar Rp. 36.397.502.336,78 atau sebesar 90,39% dengan proporsi penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 24.433.644.086,00 (90,45%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.963.858.250,78 (90,26%). Secara detil penyerapan anggaran tahun 2019 tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	BELANJA	40.267.831.375,87	36.397.502.336,78	90,39%
1.1	Belanja Tidak Langsung	27.012.631.375,87	24.433.644.086,00	90,45%

1.2	Belanja Langsung	13.255.200.000,00	11.963.858.250,78	90,26%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.517.140.850,00	3.408.942.859,78	96,92%
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	3.517.140.850,00	3.408.942.859,78	96,92%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.070.953.400,00	3.041.446.835,00	99,04%
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	2.776.669.900,00	2.762.354.944,00	99,48%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	294.283.500,00	279.091.891,00	94,84%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	46.980.000,00	41.737.500,00	88,84%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	4.250.000,00	3.374.000,00	79,39%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	3.425.000,00	2.848.000,00	83,15%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.250.000,00	3.660.000,00	86,12%
4	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	4.000.000,00	2.200.500,00	55,01%
5	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.500.000,00	2.364.000,00	94,56%
6	Penyusunan Rencana Kerja	4.250.000,00	3.646.000,00	85,79%
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	24.305.000,00	23.645.000,00	97,28%
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	2.185.039.500,00	2.028.974.827,00	92,86%
1	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	99.740.000,00	97.579.000,00	97,83%
2	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	742.072.500,00	710.151.700,00	95,70%
3	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	542.231.000,00	476.798.142,00	87,93%
4	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	748.556.000,00	706.402.235,00	94,37%
5	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan	52.440.000,00	38.043.750,00	72,55%

	dan Pembiayaan Daerah			
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	803.741.650,00	646.146.600,00	80,39%
1	Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA-SKPD	125.127.000,00	115.412.500,00	92,24%
2	Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D	230.734.000,00	228.047.000,00	98,84%
3	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	69.646.000,00	68.957.000,00	99,01%
4	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	108.226.250,00	69.170.000,00	63,91%
5	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	36.400.000,00	24.774.000,00	68,06%
6	Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	233.608.400,00	139.786.100,00	59,84%
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1.552.776.600,00	1.157.003.979,00	74,51%
1	Proses Pengolahan Data Akuntansi	111.414.000,00	92.130.200,00	82,69%
2	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	386.384.600,00	279.138.501,00	72,24%
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	386.809.000,00	337.508.278,00	87,25%
4	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	83.771.000,00	65.339.000,00	78,00%
5	Penyempurnaan, Pengembangan, dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah	584.398.000,00	382.888.000,00	65,52%
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG	1.181.079.900,00	830.266.200,00	70,30%

	MILIK DAERAH			
1	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	195.399.900,00	170.777.900,00	87,40%
2	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	724.217.000,00	534.778.500,00	73,84%
3	Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	261.463.000,00	124.709.800,00	47,70%
8	PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	897.488.100,00	809.339.450,00	90,18%
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	897.488.100,00	809.339.450,00	90,18%

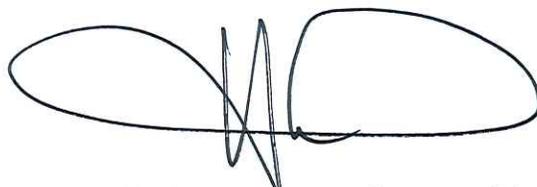
BAB IV PENUTUP

Setelah dilakukan analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran, pada akhirnya dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2019, Program Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, telah berhasil melaksanakan kegiatan, antara lain: Melaksanakan Administrasi Perkantoran secara tertib sebagai Penunjang Kelancaran Tupoksi; Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; Melaksanakan Bintek, Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD se Kabupaten Lumajang dan Melaksanakan Penyusunan Laporan APBD Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Secara umum kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang lebih dikarenakan keterbatasan Personalia, minimnya SDM Bidang Akuntansi dan sering terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan.

Lebih lanjut untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana strategis 2019 - 2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, melakukan penambahan personalia sarjana Akuntansi, meningkatkan SDM Bidang Pengelolaan Keuangan dan memberikan sosialisasi dalam rangka partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

BAB IV PENUTUP

Setelah dilakukan analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran, pada akhirnya dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2019, Program Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, telah berhasil melaksanakan kegiatan, antara lain: Melaksanakan Administrasi Perkantoran secara tertib sebagai Penunjang Kelancaran Tupoksi; Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; Melaksanakan Bintek, Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD se Kabupaten Lumajang dan Melaksanakan Penyusunan Laporan APBD Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Secara umum kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang lebih dikarenakan keterbatasan Personalia, minimnya SDM Bidang Akuntansi dan sering terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan.

Lebih lanjut untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana strategis 2019 - 2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, melakukan penambahan personalia sarjana Akuntansi, meningkatkan SDM Bidang Pengelolaan Keuangan dan memberikan sosialisasi dalam rangka partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2019**

TUJUAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN		KET
			INDIKATOR	CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Opini BPK - RI terhadap LKPD	1. Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	<ol style="list-style-type: none"> Perbup No 73 th 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang TA 2020 Perbup No 72 th 2019 tentang Analisis Standart Belanja untuk Penyusunan RKA SKPD TA 2020 Perbup No 9 th 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Kab. Lumajang Melaksanakan Bimtek Penyusunan RKA Kepada Perangkat Daerah Integrasi SIP-APBD dengan Sistem Informasi Standart Harga (SISAGA) Perbup No 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2019 	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah

		<p>2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD</p>	<p>1. Melaksanakan Bimtek Penyusunan RKA Perubahan Kepada Perangkat Daerah</p> <p>2. Perbup No 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019</p>	<p>1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>2. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah</p>
	<p>3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI</p>	<p>1. Perbup No. 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD</p> <p>2. Perbup No. 82 th 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMD</p> <p>3. Perbup No. 86 th 2019 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan BMD</p> <p>4. Keputusan Bupati Lumajang No : 188.45/286/427.12/2019 tentang Tim Inventarisasi, Validasi dan Penilai Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Bangunan, Jalan, Jembatan, Irigasi, Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Th. 2019</p>	<p>1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	

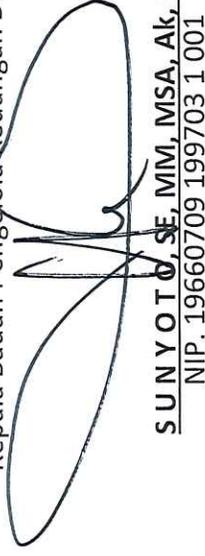
**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Plt. Sekretaris
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,517,140,850	3,408,942,859.78	96.92%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,070,953,400	3,041,446,835	99.04%
3	Meningkatnya pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	46,980,000	41,737,500	88.84%
4	Meningkatnya fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase jumlah kegiatan pengelolaan keuangan yang terfasilitasi	100%	100%	897,488,100	809,339,450	90.18%

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Plt. Sekretaris


SUNYOTO, SE, MM, MSA, AK, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001


SLAMET NURHADI, S. Sos, M. Si
 NIP. 197511112 199703 1 003

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Bidang Perbendaharaan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD	100%	100%	803,741,650	646,146,600	80.39%

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah


SUNYOTO, SE, MIM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001

Kepala Bidang Perbendaharaan


WIJI UTAMI
 NIP. 19690418 199202 2 003

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Bidang Anggaran
 TAHUN ANGGARAN : 2019

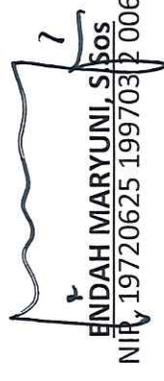
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran SKPD	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran SKPD	100%	100%	2,185,039,500	2,028,974,827	92.86%

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Bidang Anggaran



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001



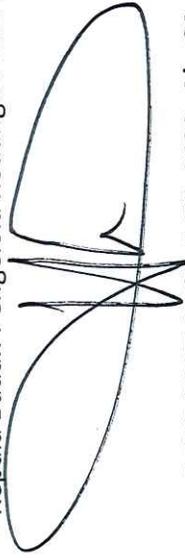
ENDAH MARYUNI, S.Sos
 NIP. 19720625 199703 2 006

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 TAHUN ANGGARAN : 2019

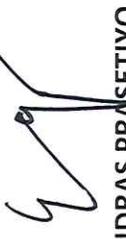
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Secara Cepat dan Akuntabel	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Secara Cepat dan Akuntabel	100%	100%	1,181,079,900	830,266,200	70.30%

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



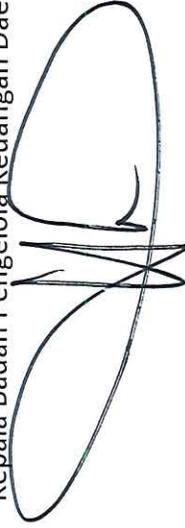
ENDRAS PRASETIYO, SE
 NIP. 19621204 199403 1 002

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD SKPD	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD SKPD	100%	95%	1,552,776,600	1,157,003,979	74.51%

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MIM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19660709 199703 1 001

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan



REYLIA OLIVIASARI, SE
 NIP. 19770510 200604 2 038

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	25 Eks	3,425,000	2,848,000	83.15%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	40 eks	4,250,000	3,660,000	86.12%
3	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	36 eks	4,000,000	2,200,500	55.01%

	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	10 eks NA & Raperda	897,488,100	809,339,450
		Jumlah website BPKD yang update		103 PA/ KPA x 3 kali, 103 PPK SKPD & 103 PPTK SKPD x 1 kali, 25 Banggar DPRD, 103 Pengurus dan perencanaan barang		
		Jumlah website BPKD yang update		1 Website		
		Jumlah Total Anggaran			909,163,100	818,047,950
						89.98%

Pt. Sekretaris



SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19751112 199703 1 003

Kepala Sub Bagian Keuangan



SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19751112 199703 1 003

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1		3	4	5	6	7
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terlaksana	40 item	3,517,140,850	3,408,942,860	96.92%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
2	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia	1 server, 3 laptop, 3 scanner, 1 sound system, 3 Printer Laserjet, 1 paket tanaman, 6 set sketsel, 1 Tandon Air, rehab ruang Kepala BPKD	2,776,669,900	2,762,354,944	99.48%

3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihar	28 roda 2, 3 unit roda 4, 1 genset, 15 UPS, 1 kamera, 1 LCD, 30 komputer, 2 unit jaringan, 2 mesin fotocopy, 17 AC, 6 Laptop, 1 gedung BPKD, 1 taman BPKD, 50 kursi rapat	294,283,500	279,091,891	94.84%
Jumlah Total Anggaran				6,588,094,250	6,450,389,695	97.91%

Pt. Sekretaris



SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19751112 199703 1 003

Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



ABDULLAH FAISOL

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP	40 eks	Rp 4,250,000	3,374,000	79.39%
2	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	20 eks	Rp 2,500,000	2,364,000	94.56%
3	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Renja	40 eks	Rp 4,250,000	3,646,000	85.79%
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan BPKD	76 eks	Rp 24,305,000	23,645,000	97.28%
	Jumlah Total Anggaran			Rp 35,305,000	Rp 33,029,000	93.55%

Plt. Sekretaris


SLAMET NURHADI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19751112 199703 1 003

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program



ABINAJAH, SE
 NIP. 19650407 198603 1 019

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
KA SUB BID : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah kebijakan daerah	36 kebijakan anggaran daerah	742,072,500	710,151,700	95.70%
2	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD 2019, dokumen penjabaran APBD 2019 Dokumen perubahan penjabaran APBD 2019 dokumen perubahan APBD 2019,dokumen penjabaran perubahan APBD 2019 dokumen rancangan APBD 2020, dokumen rancangan penjabaran APBD 2020	Pergeseran anggaran TA 2019 15 Eks Perubahan penjabaran APBD TA. 2019 (3 buku x 5 eks x 1 kali perubahan) 93 Eks perubahan penjabaran APBD TA. 2019 per SKPD (93 SKPDx 1 buku x 1 eks x 1 kali perubahan) 10 Eks Perubahan penjabaran APBD TA. 2019 (2 buku x 5 eks x 1 kali perubahan)	542,231,000	476,798,142	87.93%

			11 Eks Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019 per SKPD (11 SKPD x 1 buku x 1 eks x 1 kali perubahan)			
Jumlah Total Anggaran				1,284,303,500	1,186,949,842	92.42%

Kepala Bidang Anggaran


ENDAH MARYUNI, S.Sos
 NIP. 19720625 199708 2 006

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran


RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
 NIP. 19851110 200903 1 002

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
JABATAN : Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja
TAHUN ANGGARAN : 2019

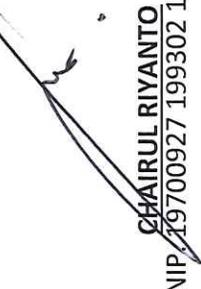
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumentasi analisa standara belanja dan dokumen standar biaya	- 125 eks Buku Analisa Standar Belanja - 125 eks Buku Standar Biaya	99,740,000	97,579,000	97.83%
2	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan anggaran Jumlah dokumen RKA pergeseran yang diteliti sisi belanja Jumlah dokumen RKA dan RKPA SKPD yang diteliti sisi belanja Jumlah dokumen RKAS dan RKPAS BOS Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS Daerah	430 orang paham penyusunan anggaran 105 RKA Pergeseran verif 90 RKA Pergeseran verif 105 RKPA SKPD verif 649 RKPAS BOS verif 105 RKA SKPD verif 649 RKAS BOS verif 75 SKPD data gaji PNS verif	748,556,000	706,402,235	94.37%
	Jumlah Total Anggaran			848,296,000	803,981,235	94.78%

Kepala Bidang Anggaran



ENDAH MARYUNI, S.Sos
NIP. 19720625 199703 2 006

Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja



CHAIRUL RIYANTO
NIP. 19700927 199302 1 001

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Ka Sub Bid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen RKA pergeseran sisi pendapatan yang diteliti	16 RKA pergeseran verif	52,440,000	38,043,750	72.55%
	Jumlah Total Anggaran			52,440,000	38,043,750	72.55%

Kepala Bidang Anggaran


ENDAH MARYUNI, S.Sos
 NIP. 19720625 199703 2 006

Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan & Pembiayaan


VITA KRISTIYANTI, SE
 NIP. 19800917 200501 2 011

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
JABATAN : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	Jumlah dolumen penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	108,226,250	69,170,000	63.91%
	Jumlah Total Anggaran			108,226,255	69,170,006	63.91%

Kepala Bidang Perbendaharaan


WIJIUTAMI
NIP. 19690418 199202 2 003

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Penerimaan



TRIDI SAFUL Hidayat, S. Sos
NIP. 19640422 199403 1 006

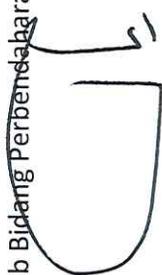
**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Umum
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Buku DPA/DPPA	345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	125,127,000	115,412,500	92.24%
2	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	Jumlah dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BUD	5400 Rekening Koran	69,646,000	68,957,000	99.01%
3	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD yang di terbitkan	120 eks	36,400,000	24,774,000	68.06%
	Jumlah Total Anggaran			231,173,000	209,143,500	90.47%

Kepala Bidang Perbendaharaan

WIJI UTAMI
 NIP. 19690418 199202 2 003

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Umum

SARI MUIDAH
 NIP. 19650927 198603 2 013

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Ka Sub Bid Perbendaharaan Pengeluaran
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D	Persentase SPM yang dilakukan verifikasi sesuai ketentuan	90%	230,734,000	228,047,000	98.84%
2	Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	102 org Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 54 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 250 Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) 599 Bendahara Dana BOS dan operator 60 org Peserta Bimtek Pertanggungjawaban Dana Hibah Jalan	233,608,400	139,786,100	59.84%
Jumlah Total Anggaran				464,342,400	367,833,100	79.22%

Kepala Bidang Perbendaharaan



WIJI UTAMI

NIP. 19690418 199202 2 003

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Pengeluaran



RITA SUGIARTI, SE

NIP. 19860916 201101 2 017

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	85 Draft Laporan Keuangan 85 Buku Nota Keuangan 85 Japem 90 Final Lap Keuangan	386,809,000	337,508,278	87.25%
2	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi, konsolidasi dan evaluasi Laporan Keuangan SKPD	104 SKPD	83,771,000	65,339,000	78.00%
	Jumlah Total Anggaran			470,580,000	402,847,278	85.61%

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan

Kasubid Pelaporan Keuangan



REYLIA OLIVASARI, SE
 NIP. 19770510 200604 2 038



DEDIK TRISNAWAN Y
 NIP. 19761231 199602 1 002

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Proses Pengolahan Data Akuntansi	Jumlah Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang terolah	35.000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4.500 lembar transaksi pengeluaran kas	111,414,000	92,130,200	82.69%
	Jumlah Total Anggaran			111,414,000	92,130,200	82.69%

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan


REYLIA OLIVIASARI, SE
 NIP. 19770510 200604 2 038

Kepala Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi


FARIS KHOIRUL FIRDAUSI, SE
 NIP. 19870412 200903 1 008

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

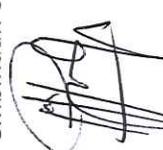
SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Plt. Kepala Sub Bidang Pembinaan & Pengembangan SAPD
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Implementasi sistem akuntansi Pemerintah daerah	462 peserta	386,384,600	279,138,501	72.24%
2	Penyempurnaan, Pengembangan, dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi	4 Aplikasi	584,398,000	382888000	65.52%
	Jumlah Total Anggaran			970,782,600	662,026,501	68.20%

Ka. Bid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan


REYLIA OLIVIASARI, SE
 NIP. 19770510 200604 2 038

Plt. Kepala Sub Bidang Pembinaan & Pengembangan SAPD


NENI KURNIA A, A. Md
 NIP.19860410 200903 2 007

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH					
1	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	Jumlah buku Standart Harga Satuan Barang, jumlah buku Rencana Kebutuhan Barang Daerah, Jumlah Draft Regulasi Barang Milik Daerah	150 Buku 46 Buku 15 Buku	195,399,900	170,777,900	87.40%
	Jumlah Total Anggaran			195,399,900	170,777,900	87.40%

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



ENDRAS PRASETYO, SE
 NIP. 19621204 199403 1 002

Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan



ISMOYO DOSO SATRIO
 NIP. 19641110 199302 1 001

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH					
1	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta bimtek pengurus barang	85 peserta/OPD	724,271,000	534,778,500	73.84%
		Jumlah KIB yang terinventarisasi dan tervalidasi BMD	6 KIB			
		Jumlah tanah milik Pemda yang disertifikatkan	26 Sertifikat			
		Jumlah laporan BMD	2 kali/tahun Lap BMD			
		Jumlah papan aset daerah yang tersedia/ terpelihara dan jumlah surat berharga yang tersimpan	55 buah papan nama/ surat berharga			
		Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI	100%			
	Jumlah Total Anggaran			724,271,000	534,778,500	73.84%

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah



ENDRAS PRASETYO, SE
NIP. 19621204 199403 1 002

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang



MAS' UDI, S. Sos
NIP. 19730425 199602 1 001

**FORMULIR LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 JABATAN : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan & Pemindahtanganan
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH					
1	Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prosentase dokumen pemindahtanganan BMD, Prosentase dokumen Pemanfaatan BMD, Prosentase Penghapusan BMD	85%, 85% dan 80%	261,463,000	124,709,800	47.70%
	Jumlah Total Anggaran			261,463,000	124,709,800	47.70%

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



ENDRAS PRASETYO, SE
 NIP. 19621204 199403 1 002

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan & Pemindahtanganan



MOKH. HERMANSYAH
 NIP. 19711217 199602 1 001